

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peralihan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi dapat dilihat atas keputusan merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014, dimana dalam UU tersebut menekankan mengenai pemberian wewenang, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan membentuk Perangkat Daerah yang memiliki tugas dalam membantu Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah dengan tujuan dapat mengelola kerumahtagaannya secara mandiri dengan meminimalisir campur tangan Pemerintah Pusat (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 ini juga memberikan otonomi yang luas bagi Pemerintah Daerah agar berperan secara aktif dalam mengatur maupun mengelola sumber pemasukan bagi penganggaran belanja-belanja daerah yang salah satunya yakni belanja modal dan harapannya bisa segera mewujudkan kemakmuran masyarakat lewat pemberdayaan rakyat, meningkatkan pelayanan, serta peran secara langsung dari masyarakat sehingga Pemerintah Daerah tidak selalu bergantung pada Pemerintah Pusat.

Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat di setiap daerah yakni menaikkan serta memperbaiki pelayanan publik melalui penganggaran belanja modal, dimana dampak dari melakukan belanja modal ialah penambahan aset tetap yang dapat digunakan untuk memenuhi pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah (Purwanto, 2013) dan perihal tersebut

membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD ialah rancangan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Ketika penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemda serta DPRD mendapat bantuan dari Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat DPRD, Sekretaris Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Dinas Daerah yang bertugas menjadi pembantu Kepala Daerah saat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).

Menurut Purwanto (2013) pertumbuhan ekonomi saling berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan perbedaannya terletak pada cakupan, bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan terhadap metode pengembangan pembuatan barang atau jasa saat melakukan beberapa kegiatan ekonomi sedangkan pembangunan mencakup bagaimana perealisasi sumber daya yang ada di sektor kegiatan ekonomi dan dapat membuat pembaruan pada sumber pemasukan serta harta diantara golongan pelaku ekonomi. Dari hasil penelitian Yovita (2011) mengungkapkan Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal, dimana berbeda dengan hasil penelitian dari Sulamo (2013) yang mengungkapkan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa saat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah mengalami peningkatan, maka hal itu bisa berpengaruh terhadap penerimaan APBD pada setiap daerah sehingga akan memengaruhi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Selanjutnya bisa dilihat pemaparan data belanja modal dan penerimaan APBD milik seluruh Kabupten/Kota

di Provinsi Jawa Tengah pada setiap tahunnya yang datanya didapatkan dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Belanja Modal dan Penerimaan APBD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Belanja Modal	Penerimaan APBD
2015	10.505	63.297
2016	14.549	68.966
2017	14.620	74.605
2018	13.850	75.587
2019	13.413	80.163

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berlandaskan tabel di atas bahwa anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019 masih mengalami fluktuasi dan terbanding terbalik dengan penerimaan APBD yang mengalami peningkatan, dimana seharusnya saat penerimaan APBD mengalami peningkatan akan dapat meningkatkan belanja modal sebab dana yang dipakai guna belanja tersebut bersumber dari APBD. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah belum bisa mengalokasikan APBD untuk belanja daerah yang mendukung kegiatan maupun program mereka seperti belanja modal. Dalam penelitian Rahmawati (2017) menyatakan sebaiknya pemanfaatan belanja daerah digunakan untuk hal-hal produktif, seperti mendukung program-program yang berkaitan langsung dengan layanan publik. Maka dari itu, Pemerintah

Daerah seharusnya bisa mengalokasikan belanja modal dengan baik sebab belanja tersebut merupakan salah satu langkah Pemerintah Daerah dalam upaya menyediakan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat.

Kapabilitas keuangan yang dimiliki setiap daerah pasti berbeda-beda dalam mencukupi dana untuk segala operasional. Kesenjangan fiskal antar daerah yang terjadi merupakan efek dari kurangnya kemampuan keuangan pada masing-masing daerah dan solusinya Pemerintah Pusat dapat memberi suntikan dana lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap Pemerintah Daerah demi mencukupi keperluan serta kebutuhan agar bisa melaksanakan desentralisasi dengan baik yakni Dana Alokasi Umum (DAU). DAU ialah dana perimbangan yang dalam mengalokasikan dananya menginginkan aspek pemerataan kapabilitas keuangan pada setiap daerah dalam membiayai keperluan daerah yang didapatkan dari APBN ketika melakukan desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014). APBN merupakan rancangan dana yang disusun oleh Pemerintah Pusat dalam kurun waktu tahunan yang ditetapkan dalam undang-undang (UU No. 23 Tahun 2014). Dalam penelitian Yovita (2011) menyatakan bahwa adanya suntikan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum yakni bisa membantu meringankan Pemerintah Daerah mengenai keuangan dan diharapkan dapat mengalihkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diperoleh ke pembiayaan belanja modal di daerah tersebut, tetapi kenyataannya bantuan dana tersebut oleh Pemerintah Daerah dijadikan sebagai pemasukan utama dalam mencukupi dana pengoperasian utama pada agenda ataupun kegiatan belanja sehari-hari yang biasanya disebut belanja daerah. Hasil penelitian dari Yovita (2011) mengungkapkan Dana Alokasi Umum

berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal sedangkan berbeda dengan hasil penelitian dari Ifa (2017) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Menurut Waskito, Zuhrotun, dan Ruserlisyani (2019) mengungkapkan bahwa PAD ialah sumber keuangan yang didapatkan dari hasil mengelola sumber daya yang ada pada setiap daerah dan PAD ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah dalam mencukupi kebutuhan belanjanya terkhusus belanja modal. PAD diperoleh melalui beragam sumber, antara lain hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (UU No. 23 Tahun 2014). Hasil penelitian dari Waskito, Zuhrotun, dan Ruserlisyani (2019) mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Belanja Modal sedangkan berbeda dengan hasil penelitian dari Purwanto (2013) menyatakan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Selain dari PAD dan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam mencukupi segala kegiatannya, Pemerintah Daerah juga bisa menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau biasanya disebut SiLPA yang bersumber dari defisit antara alokasi dana yang sudah ditetapkan dan dana tidak terpakai sehingga SiLPA bisa dialokasikan ke dalam APBD periode tahun depan (Permendagri No.64 Tahun 2013). Hasil penelitian dari Rahmawati (2017) mengungkapkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, dimana berbeda dengan hasil

penelitian dari Ifa (2017) menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Menurut Heriston dan Anastasya (2018) mengungkapkan bahwa belanja modal ialah kegiatan belanja Pemerintah Daerah yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun anggaran dengan harapan bisa memperbanyak harta bagi daerah yang kemudian ditambahkan dalam belanja rutin. Sehingga hasil dari belanja tersebut dapat dipakai oleh Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat.

Terdapat data di situs Badan Pusat Statistik serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang menyediakan komponen angka dari Pertumbuhan Ekonomi (PE) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019, apakah memiliki dampak kepada Belanja Modal (BM) setiap tahunnya. Selanjutnya ada pemaparan data dari PE, PAD, DAU, SiLPA, dan BM milik seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data PE, PAD, DAU, SiLPA dan BM seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 (dalam milliar rupiah)

Tahun	PE	PAD	DAU	SILPA	BM
2015	0,0548	9.793	31.094	20.968	10.505
2016	0,0546	11.274	34.661	11.675	14.549
2017	0,0525	14.397	33.488	7.468	14.620
2018	0,0529	13.054	33.486	7.214	13.850

2019	0,0526	14.210	35.056	6.559	13.413
------	--------	--------	--------	-------	--------

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berlandaskan tabel di atas memperlihatkan perubahan komponen angka pada Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran selama periode 2015-2019 yang masih mengalami fluktuasi serta tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal dan terbanding terbalik dengan hasil penelitian Lumbanraja (2019) yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan berpengaruh positif terhadap belanja modal sehingga peneliti ingin mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang mengikuti saran dari Fiona Puspita Devi Purwanto (2013) dengan menambahkan periode menjadi lima tahun dan menambah variabel independen sehingga variabel yang digunakan, yakni Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal. Selanjutnya penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2015-2019, maka dari itu judul yang dipakai ialah **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan sejumlah paparan masalah sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang bisa disusun sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Batasan Masalah

Dalam hal untuk membuat penelitian ini bisa lebih fokus, peneliti membatasinya dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Durasi tahun penelitian yang digunakan hanya dalam kurun 2015-2019.

2. Hanya satu sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Variabel independennya yakni Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran untuk variabel dependennya yakni Belanja Modal.

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada uraian rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, dapat dilihat tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk membuktikan apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk membuktikan apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk membuktikan apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk membuktikan apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berlandaskan pada tujuan diatas, penelitian ini harapannya mampu menyediakan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan tambahan petunjuk yang cukup penting mengenai pengoptimalan potensi yang dimiliki daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mendorong kesuksesan daerah.
2. Bagi pengembangan ilmu, dengan adanya penelitian ini harapannya bisa menjadi acuan dalam mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal khususnya atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Bagi praktisi bisnis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan pembisnis untuk mengetahui potensi dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum mereka menetapkan proyek.

1.6 Sistematika Pembahasan

1.6.1 BAB I

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan gambaran umum mengenai penelitian dan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

1.6.2 BAB II

Bab II merupakan Kajian Pustaka yang berisikan landasan teori dan pengertian variabel, hasil penelitian terdahulu, kerangka pikir atau kerangka konseptual penelitian, dan hipotesis penelitian

1.6.3 BAB III

Bab III merupakan Metode Penelitian yang berisikan cara pengambilan data dan pengolahan data, rancangan penelitian, definisi operasional, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik analisis data, jenis data, dan sumber data.

1.6.4 BAB IV

Bab IV merupakan Analisis Data dan Pembahasan yang berisikan gambaran umum objek penelitian, deksripsi variabel penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

1.6.5 BAB V

Bab V merupakan Simpulan dan Saran yang berisikan simpulan serta saran sesuai dengan hasil analisis yang sudah dilaksanakan.